ABSTRAK

Kajian mengenai kebijakan dividen merupakan topik yang menarik untuk diteliti meskipun terjadi banyak perdebatan atas berbagai teori mengenai dividen. Dalam penelitian ini kebijakan dividen akan dikaji melalui teori keagenan dengan memperhatikan keberadaan prinsipal yaitu kepemilikan institusi dan *debtholder.* Kepemilikan institusi yang stabil dan berjumlah besar memiliki keunggulan dalam *monitoring* dan memberikan pengaruh terhadap perusahaan. Demikian pula kekuatan *debtholder* melalui *debt contract*nya dapat mempengaruhi dan membatasi kebijakan perusahaan dalam penentuan kebijakan keuangan perusahaan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepemilikan institusi dan *debtholders power* terhadap profitabilitas dan kebijakan dividen perusahaan yang dimediasi oleh mekanisme *internal corporate governance* pada perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia.

Penelitian dilakukan pada semua perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2010. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari Pusat Informasi Pasar Modal Indonesia dan *Indonesian Capital Market Directory*. Pengambilan sampel melalui *pooling data* dan berdasarkan *purposive sampling* diperoleh sampel 123 unit analisis dari 76 perusahaan. Penyelesaian estimasi *path model* menggunakan program AMOS 16.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa stabilitas dan persentase kepemilikan institusi memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas dan kebijakan dividen perusahaan. Kekuatan *debtholders* berpengaruh negatif terhadap mekanisme *internal corporate governance* dan kebijakan dividen. Sedangkan mekanisme *internal corporate governance* tidak dapat berperan sebagai mediasi antara prinsipal dan kinerja keuangan perusahaan. Karakteristik perusahaan dan industri yaitu ukuran perusahaan, keberadaan kepemilikan institusi keuangan dan jenis industri memiliki pengaruh atas perbedaan hasil estimasi penelitian.

Kata kunci: kebijakan dividen, kepemilikan institusi, *debtholders*, *internal corporate governance.*